

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI PAPUA BARAT**

2008

*WELFARE INDICATORS OF
PAPUA BARAT PROVINCE*

2008

ISSN :

No. Publikasi/Publication Number : 91522.0913

Katalog BPS/BPS Catalogue : 4102004.9100

Ukuran Buku/Book Size : 16,5 cm x 21 cm

Jumlah Halaman/Total Pages : xiv + 65 halaman /77 pages

Naskah/Manuscript :

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Papua Barat

Gambar Kulit/Cover Design :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
BPS Provinsi Papua Barat

Diterbitkan Oleh/Published by :

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Dicetak Oleh/Printed by :

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the source



KATA SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut gembira penerbitan publikasi **Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2008**. Publikasi ini dapat diterbitkan atas kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat untuk kali yang kedua.

Data dan informasi yang terangkum dalam publikasi ini dapat dijadikan sebagai input bagi perencanaan pembangunan sekaligus mengukur dampak dari pembangunan sosial dan ekonomi yang telah dilaksanakan di Provinsi Papua Barat. Dengan demikian kehadiran publikasi ini sangat dirasakan manfaatnya bagi pemantauan perkembangan pembangunan di Tanah Papua yang kita cintai.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan publikasi ini saya ucapkan terima kasih.

Manokwari, Agustus 2009
Kepala BAPPEDA Provinsi Papua Barat

Drs. Ishak L. Hallatu
Pembina Tingkat I
NIP. 640013913



KATA PENGANTAR

KEPALA BPS PROVINSI PAPUA BARAT

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2008 merupakan publikasi tahunan BPS dan merupakan penerbitan kedua yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Provinsi Papua Barat antar waktu dan perbandingannya antar kabupaten/kota.

Data yang digunakan bersumber dari BPS. Sebagian besar data indikator kesejahteraan rakyat merujuk pada keadaan Juli 2007 dan 2008 (data Susenas 2007 dan 2008). Khusus untuk data ketenagakerjaan bersumber dari Sakernas 2007 dan 2008 keadaan Agustus.

Publikasi ini menyajikan aspek-aspek kesejahteraan yang dapat diukur dan tersedia datanya. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Bidang-bidang tersebut adalah kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan, perumahan, serta kondisi sosial lainnya.

Kepada semua pihak yang secara aktif memberikan sumbangsih hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Manokwari, Agustus 2009
Kepala BPS Provinsi Papua Barat

Ir. Tanda Sirait, MM
NIP. 340005623

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA SAMBUTAN | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| TINJAUAN UMUM | xi |
| | |
| I. KEPENDUDUKAN | 1 |
| JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK | 2 |
| PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK | 4 |
| ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN..... | 4 |
| II. KESEHATAN | 9 |
| III. PENDIDIKAN | 15 |
| ANGKA MELEK HURUF DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH | 16 |
| ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH | 19 |
| ANGKA PARTISIPASI MURNI | 21 |
| IV. KETENAGAKERJAAN..... | 25 |
| TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA | 26 |
| TPAK DAN TPT MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN | 27 |

| | |
|--|----|
| V. KEMISKINAN | 29 |
| JUMLAH PENDUDUK MISKIN | 29 |
| PERKEMBANGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN | 34 |
| VI. PERUMAHAN | 41 |
| KUALITAS PERUMAHAN | 42 |
| PENERANGAN | 44 |
| SANITASI LINGKUNGAN | 46 |
| VII. INFORMASI SOSIAL LAINNYA | 49 |
| LAMPIRAN | 57 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007 dan 2008 | 3 |
| Tabel 3.1 | Angka Melek Huruf dan Lama Sekolah di Provinsi Papua Barat Tahun 2008 | 17 |
| Tabel 3.2 | Ijazah tertinggi yang dimiliki penduduk di Provinsi Papua Barat Tahun 2008 | 18 |
| Tabel 3.3 | Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Barat Tahun 2008 | 20 |
| Tabel 3.4 | Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat Tahun 2008 | 22 |
| Tabel 5.1 | Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007 dan 2008 | 30 |
| Tabel 5.2 | Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2006-2007 | 32 |
| Tabel 5.3 | Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan dan Rasio Gini Tahun 2007-2008 | 36 |
| Tabel 5.4 | Persentase Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga dari Tahun 2007-2008 | 37 |
| Tabel 6.1 | Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Malam Hari di Provinsi Papua Barat Tahun 2008 | 45 |
| Tabel 6.2 | Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Penampungan Akhir Tinja di Provinsi Papua Barat tahun 2008.... | 52 |

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 6.2 | Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Penampungan Akhir Tinja di Provinsi Papua Barat Tahun 2008 | 47 |
| Tabel 7.1 | Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Terhadap Teknologi Informasi di Provinsi Papua Barat Tahun 2007 dan 2008 | 50 |
| Tabel 7.2 | Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Internet Menurut Media Akses Internet di Provinsi Papua Barat Tahun 2008 | 53 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua Barat Tahun 2008 | 5 |
| Gambar 1.2 | Angka Beban Ketergantungan Provinsi Papua Barat Tahun 2007 dan 2008 | 6 |
| Gambar 1.3 | Angka Beban Ketergantungan Anak dan Tua di Provinsi Papua Barat Tahun 2007 dan 2008 | 7 |
| Gambar 2.1 | Angka Keluhan Kesehatan di Provinsi Papua Barat Tahun 2008 | 10 |
| Gambar 2.2 | Jenis Keluhan Kesehatan di Provinsi Papua Barat Tahun 2008 | 11 |
| Gambar 2.3 | Angka Kesakitan di Provinsi Papua Barat Tahun 2007 dan 2008 | 11 |
| Gambar 2.4 | Metode Pengobatan Sendiri di Provinsi Papua Barat Tahun 2008 | 12 |
| Gambar 2.5 | Tempat atau Cara Berobat Jalan di Provinsi Papua Barat Tahun 2008 | 13 |
| Gambar 4.1 | TPAK Provinsi Papua Barat Tahun 2007 dan 2008. | 27 |
| Gambar 4.2 | TPAK dan TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008 | 28 |
| Gambar 5.1 | Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2006-2007... | 33 |

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 5.2 | Persentase Kenaikan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan dari tahun 2007 - 2008 | 35 |
| Gambar 5.3 | Pola Pengeluaran Per kapita untuk Konsumsi Makanan dan Non-Makanan tahun 2008 | 38 |
| Gambar 5.4 | Pola Pengeluaran Per kapita untuk Konsumsi Makanan dan Non-Makanan tahun 2008 | 39 |
| Gambar 6.1 | Indikator Rumah Layak di Provinsi Papua Barat, 2007—2008 | 42 |
| Gambar 6.2 | Fasilitas Rumah di Provinsi Papua Barat, 2007—2008 | 43 |



TINJAUAN UMUM

Ruang lingkup Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Provinsi Papua Barat 2008 menyajikan gambaran perkembangan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat. Analisis yang disajikan memuat perbandingan kondisi kesejahteraan rakyat selama periode 2007–2008 dan meliputi semua kabupaten/kota di provinsi Papua Barat.

Indikator yang disajikan dipilah menurut beberapa dimensi. Dimensi yang dimaksud adalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan, perumahan dan indikator sosial lain.

Meskipun demikian, tidak semua indikator dapat disajikan dalam publikasi ini. Publikasi ini hanya menyajikan permasalahan kesejahteraan rakyat yang dapat diamati dan terukur (*measurable welfare*) baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit.

Perkembangan Kesejahteraan Rakyat

Perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat selama periode 2007 dan 2008 menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan penduduk selama 2007–2008 masih dalam batas wajar. Penduduk tumbuh dengan rata-rata 1,95 persen per tahun.

Beberapa indikator kesejahteraan rakyat menunjukkan perbaikan. Di bidang pendidikan:

- ◆ APS 7–12 tahun meningkat dari 92,64 persen pada tahun 2007 menjadi 93,18 persen pada tahun 2008. Pada periode yang sama, APS 13–15 tahun juga meningkat dari 87,58 persen menjadi 88,75 persen.
- ◆ Angka melek huruf tahun 2008 meningkat dibandingkan tahun 2007 yaitu dari 90,32 persen menjadi 92,15 persen

- ◆ Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,65 tahun pada tahun 2007 menjadi 7,67 tahun pada tahun 2008.

Di bidang ketenagakerjaan:

- ◆ Kenaikan TPAK dari 66,52 persen pada tahun 2007 menjadi 68,15 persen pada tahun 2008.
- ◆ Tingkat pengangguran (TPT) turun dari 9,46 persen pada tahun 2007 menjadi menjadi 7,65 persen pada tahun 2008.

Meskipun garis kemiskinan meningkat tetapi jumlah dan persentase penduduk miskin berkurang dari tahun 2007 ke tahun 2008. Lampiran 5 (1) menunjukkan jumlah penduduk miskin telah berkurang 29,50 ribu jiwa selama periode 2007 dan 2008.

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin diperkuat oleh penurunan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Barat turun dari 12,97 menjadi 10,83 pada tahun 2008. Indeks keparahan kemiskinan turun dari 5,66 menjadi 4,55 selama periode yang sama.

Beberapa indikator lain menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan, di antaranya:

- ◆ Tingkat pemerataan mengarah pada semakin melebarnya ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh kenaikan rasio gini dari 0,33 menjadi 0,36 selama periode 2007 dan 2008.
- ◆ Tingkat pemerataan menurut Bank Dunia mengarah pada peningkatan kelompok beruntung (20 persen atas) dalam menikmati “kue” pembangunan di Tanah Papua Barat walaupun sangat kecil, dari 27,13 persen pada tahun 2007 menjadi 27,30 persen pada tahun 2008.



1. KEPENDUDUKAN

Masalah kependudukan di Provinsi Papua Barat tidak banyak berubah. Jumlah penduduk relatif kecil dibandingkan dengan luas wilayahnya, sebaran penduduk tidak merata, dan sistem administrasi kependudukan belum terlaksana dengan baik. Penduduk asli kadang tercatat di dua tempat, satu di kampung asalnya dan satu di tempat lain (kota).

Selain masalah jumlah dan komposisi penduduk, Provinsi Papua Barat juga dihadapkan pada permasalahan kualitas penduduk yang masih tergolong rendah. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2008 tercatat 67,95 dan menduduki peringkat ke-30 dari 33 provinsi di Indonesia. Dengan

kata lain, pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat menduduki peringkat 3 terbawah dari seluruh provinsi di Indonesia.

Penanganan masalah kependudukan di Provinsi Papua Barat sebaiknya difokuskan pada dua sasaran. Pertama, pengendalian jumlah penduduk dan kedua, peningkatan kualitas penduduk. Dengan dua sasaran tersebut, potensi penduduk di Provinsi Papua Barat dapat dioptimalkan untuk menunjang pembangunan di Provinsi Papua Barat menuju pembangunan berkelanjutan.

JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

Penduduk Provinsi Papua Barat tersebar tidak merata. Manokwari merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar dan Teluk Wondama merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terkecil. Jumlah penduduk Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Wondama pada tahun 2008 berturut-turut 173.382 dan 23.569 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat tergolong lambat. Meskipun telah menjadi daerah otonom, pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Barat selama 2007 - 2008 hanya 1,95 persen per tahun.

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007 dan 2008

| Kabupaten/Kota | Penduduk (Ribu)/ <i>Population (thousand)</i> | | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun/ <i>Annual Growth Rate of Population (%)</i> |
|--------------------------|--|----------------|--|
| | 2007 | 2008 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Kab. Fakfak | 65 645 | 66 864 | 1,86 |
| Kab. Kaimana | 41 346 | 41 973 | 1,52 |
| Kab. Teluk Wondama | 22 731 | 23 140 | 1,80 |
| Kab. Teluk Bintuni | 52 801 | 54 528 | 3,27 |
| Kab. Manokwari | 169 590 | 172 855 | 1,93 |
| Kab. Sorong Selatan | 60 404 | 61 463 | 1,75 |
| Kab. Sorong | 96 928 | 98 691 | 1,82 |
| Kab. Raja Ampat | 40 654 | 41 170 | 1,27 |
| Kota Sorong | 165 900 | 169 278 | 2,04 |
| PROV. PAPUA BARAT | 715 999 | 729 962 | 1,95 |

[Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Papua 2006-2015]

Laju pertumbuhan penduduk berbeda satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lain. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Teluk Bintuni selama 2007 - 2008 mencapai 3,27 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Teluk Bintuni tertinggi di Provinsi Papua Barat. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sorong terendah dengan pertumbuhan 1,82 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong tumbuh di atas dua persen per tahun.

PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat hingga tahun 2008 masih tergolong rendah. Papua Barat dengan luas wilayah 143,9 ribu kilometer per segi hanya dihuni oleh 729.962 ribu jiwa (tahun 2008). Kepadatan penduduk empat hingga lima jiwa per kilo meter per segi.

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua pada tahun 2008 Barat tergolong rendah dengan persebaran yang tidak merata. Sorong Selatan sebagai kabupaten terluas hanya dihuni oleh dua jiwa per kilo meter per segi.

Selain kepadatan penduduk rendah, persebaran penduduk Provinsi Papua Barat tidak merata. Kota Sorong dengan luas 1.105 kilo meter per segi dihuni oleh 169.278 jiwa tetapi Kabupaten Sorong Selatan dengan luas wilayah 29.810 kilo meter persegi hanya dihuni oleh 61.463 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Sorong pada tahun 2008 mencapai 153 jiwa per kilo meter persegi sementara kepadatan penduduk di Kabupaten Sorong Selatan sebagai kabupaten terluas di Provinsi Papua Barat hanya dua jiwa per kilo meter persegi.

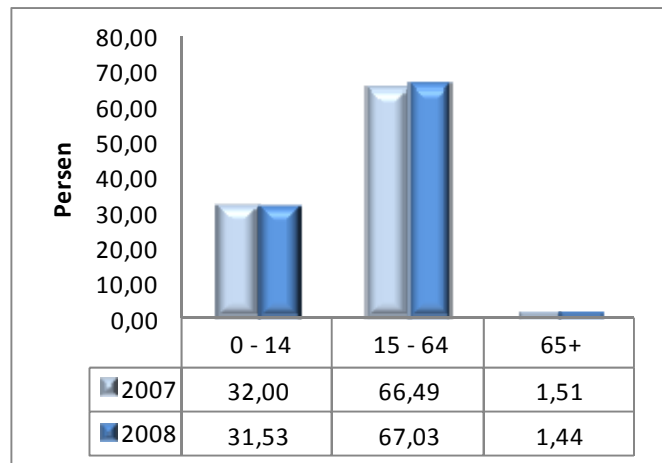
ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN

Salah satu dampak keberhasilan pembangunan bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut kelompok umur. Semakin rendahnya pro-

porsi penduduk usia tidak produktif berarti semakin rendah angka beban ketergantungan. Semakin rendah angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun) untuk meningkatkan kualitas dirinya.

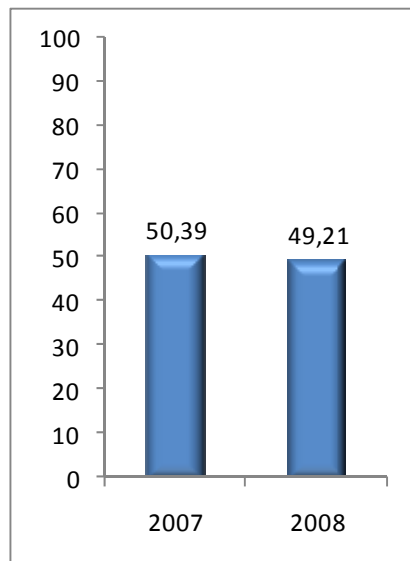
Gambar 1.1 menunjukkan komposisi penduduk Provinsi Papua Barat menurut kelompok umur anak (0–14 tahun), umur produktif (15–64 tahun) dan umur tua (65 tahun atau lebih) pada tahun 2007 dan 2008. Meskipun terdapat pergeseran komposisi penduduk menurut kelompok umur dari tahun 2007 ke tahun 2008 tetapi besaran perubahannya tidak signifikan. Struktur umur penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2007 dan 2008 tergolong muda.

Gambar 1.1
Komposisi Penduduk
Menurut Kelompok Umur
di Provinsi Papua Barat
Tahun 2007 dan 2008



Akibat pergeseran komposisi penduduk pada kelompok usia muda, angka beban ketergantungan Provinsi Papua Barat tahun 2008 meningkat dari tahun 2007. Pada tahun 2008, setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 49 penduduk usia tidak produktif. Angka beban ketergantungan ini lebih besar empat poin dari angka beban ketergantungan pada tahun 2007.

Gambar 1.2
Angka Beban Ketergantungan Provinsi Papua Barat Tahun 2007 dan 2008

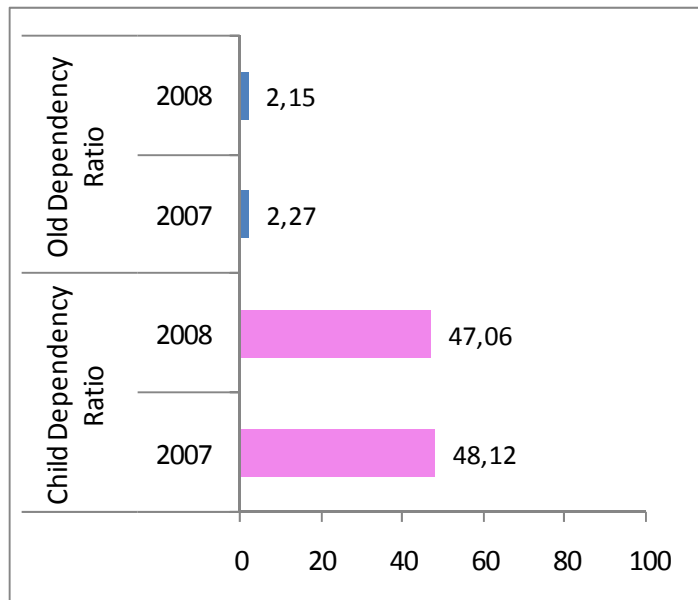


Angka beban ketergantungan tahun 2007 dan 2008 didominasi oleh angka beban ketergantungan anak (*child dependency ratio*). Setiap 100 penduduk usia produkti harus menanggung lebih dari 47 hingga 48 penduduk umur 0–14 ta-

hun. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah proporsi pengeluaran rumah tangga akan diserap oleh pengeluaran untuk kelompok yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan anak seperti susu, makanan pendamping, sekolah, dan perawatan kesehatan anak.

Angka beban ketergantungan penduduk tua masih relatif kecil. Pada tahun 2007 dan 2008, angka beban ketergantungan “tua” 2,27 dan 2,15 persen. Setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung dua hingga tiga penduduk berumur 65 tahun atau lebih.

Angka beban ketergantungan penduduk tua yang relatif kecil dipengaruhi oleh angka harapan hidup di Provinsi Papua Barat yang relatif rendah. Angka harapan hidup penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2008 tercatat hanya 67,90 tahun. Bandingkan dengan Provinsi D.I Jogjakarta, angka harapan hidupnya mencapai 74,15 tahun dan tertinggi di Indonesia.



Gambar 1.3

Angka Beban Ketergantungan Anak dan Tua di Provinsi Papua Barat Tahun 2007 dan 2008



2. KESEHATAN

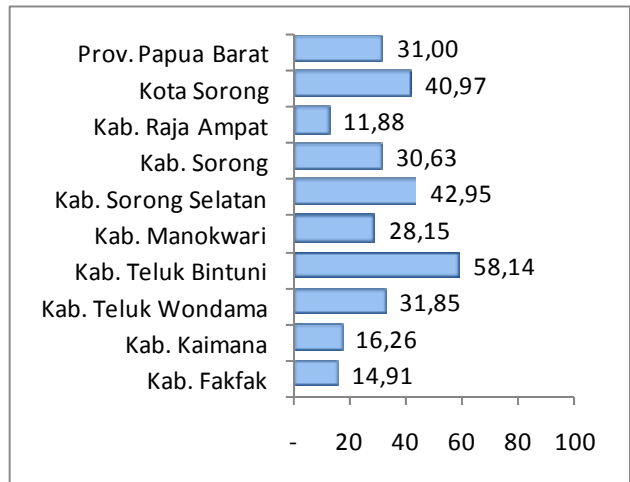
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kontribusi bidang kesehatan terhadap hidup manusia sangat signifikan. Anak-anak yang sehat lebih mudah menyerap materi pelajaran di sekolah. Pekerja yang sehat lebih produktif daripada pekerja yang sakit. Singkat kata, tanpa kesehatan yang baik mustahil dapat melakukan aktifitas secara optimal.

Salah satu indikator kesehatan adalah keluhan kesehatan yang dialami pada kurun waktu tertentu. Apabila keluhan kesehatan telah menyebabkan aktifitas rutin sehari-hari terganggu maka akan menghasilkan angka kesakitan atau yang dikenal dengan morbiditas. Semakin besar angka morbiditas berarti semakin rendah derajat kese-

hatan masyarakat.

Gambar 2.1 menunjukkan angka keluhan kesehatan di Provinsi Papua Barat tahun 2008. Keluhan kesehatan terbanyak ditemukan di Kabupaten Teluk Bintuni (58,14 per-

Gambar 2.1
Angka Keluhan
Kesehatan di Provinsi
Papua Barat Tahun
2008

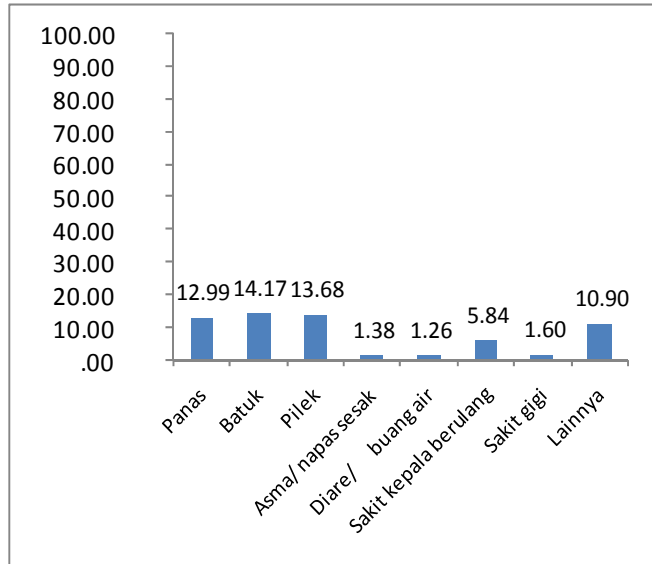


sen). Sebaliknya, keluhan kesehatan terkecil di Kabupaten Raja Ampat hanya (11,88 persen).

Dilihat dari jenis keluhan yang dialami, panas, batuk dan pilek merupakan tiga keluhan kesehatan yang paling sering dialami. Persentase keluhan panas, batuk dan pilek berturut-turut 12,99 persen; 14,17 persen dan 13,68 persen.

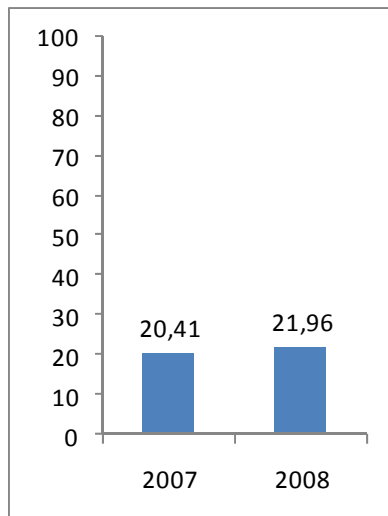
Berbeda dengan keluhan kesehatan, angka kesakitan penduduk Provinsi Papua Barat lebih rendah dari persen-

Gambar 2.2
Jenis Keluhan Kesehatan
di Provinsi Papua Barat
Tahun 2008



tase keluhan kesehatan. Angka kesakitan penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2008 sekitar 21,96 persen. Angka kesakitan tahun 2008 ini berbeda tidak signifikan

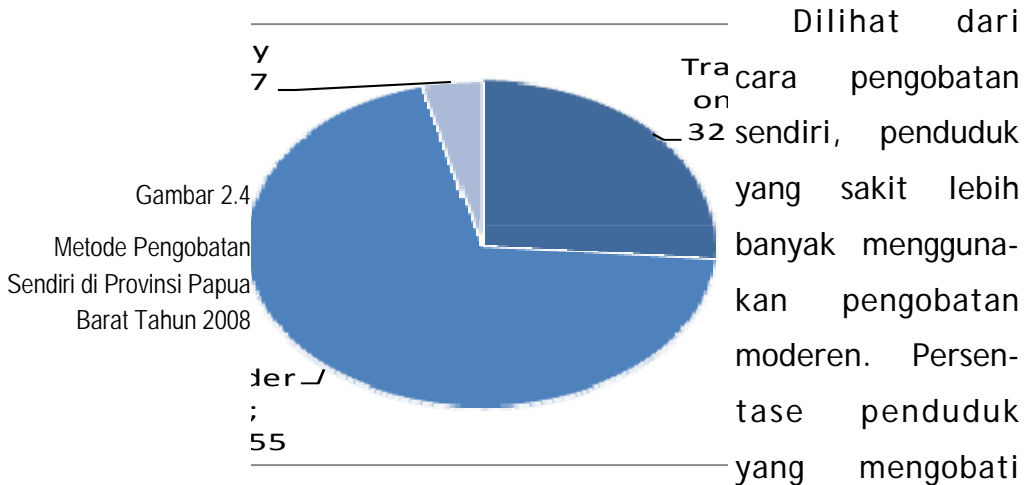
Gambar 2.3
Angka Kesakitan di
Provinsi Papua Barat
Tahun 2007 dan 2008



dengan angka kesakitan tahun 2007 yaitu 20,41 persen. Perbedaan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan mengindikasikan bahwa tidak semua

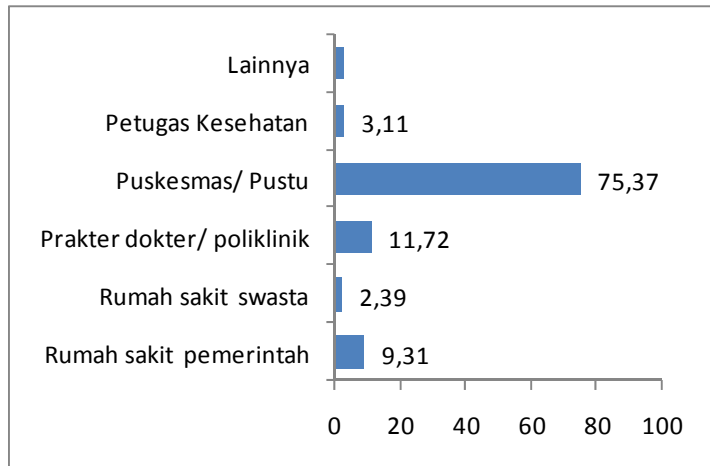
keluhan kesehatan mengakibatkan gangguan kesehatan.

Salah satu tindakan kuratif yang dijadikan indikator kesehatan adalah pengobatan sendiri. Indikator ini menunjukkan pola pengobatan yang ditempuh penduduk yang mengalami sakit. Persentase penduduk yang mengobati sendiri meningkat dari 54,75 persen pada tahun 2007 menjadi 61,25 persen pada tahun 2008. Artinya, sebagian besar penduduk yang sakit mengobati dirinya sendiri.



Selain pengobatan sendiri, penduduk yang mengalami gangguan kesehatan juga berobat jalan. Tampak pada Gambar 2.5 bahwa puskesmas merupakan sarana kesehatan yang paling banyak diakses penduduk. Persentase

Gambar 2.5
Tempat atau Cara
Berobat Jalan di Provinsi
Papua Barat Tahun 2008



penduduk yang berobat jalan ke puskesmas mencapai 75,31 persen. Itu artinya tiga dari empat penduduk yang berobat jalan memilih puskesmas sebagai tempat berobat jalan.

Selain puskesmas, tempat praktek dokter/poliklinik juga banyak diminati penduduk yang sakit. Persentase penduduk yang berobat jalan ke tempat praktek dokter atau poliklinik 11,72 persen.

Puskesmas dan tempat praktek dokter atau poliklinik memegang peranan penting dalam menopang fungsi rumah sakit. Persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit masih sangat kecil yaitu 9,31 persen. Rumah sakit di Provinsi Papua Barat terdapat di Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Fakfak.



3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakatnya, maka akan semakin majulah negara tersebut. Untuk itu pembangunan di sektor pendidikan perlu ditingkatkan yaitu dengan melakukan berbagai upaya pembangunan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan, misalnya dengan memberikan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan adalah angka melek huruf yang

mengidentifikasi kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dalam hal ini angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

ANGKA MELEK HURUF DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Gambar 3.1 menggambarkan persentase angka melek huruf di provinsi Papua Barat tahun 2007 dan 2008. Angka melek huruf tahun 2008 meningkat dibandingkan tahun 2007 yaitu dari 90,32 persen menjadi 92,15 persen. Beberapa kabupaten mengalami peningkatan prosentase angka melek huruf yaitu Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Ini berarti bahwa pemerataan pembangunan pendidikan sudah mulai dilakukan pemerintah sampai ke tingkat kabupaten. Meskipun begitu, jika dilihat dari tingkat rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua Barat belum terjadi peningkatan yang signifikan (dari 7,65 tahun pada tahun 2007 menjadi 7,67 tahun pada tahun 2008). Artinya rata-rata penduduk di Papua Barat menempuh pendidikan sampai kelas 1 SMP dan putus sekolah pada kelas 2 SMP.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun Atau Lebih di Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007 dan 2008

| Kabupaten/Kota | Angka Melek Huruf (%) / Adult Literacy Rate (%) | | Rata - rata Lama Sekolah Mean Years School (years) | |
|--------------------------|--|--------------|---|-------------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| | (1) | (2) | (4) | (5) |
| Kab, Fakfak | 97,17 | 97,17 | 8,93 | 8,93 |
| Kab, Kaimana | 95,48 | 95,48 | 7,10 | 7,10 |
| Kab, Teluk Wondama | 81,02 | 82,85 | 5,99 | 6,39 |
| Kab, Teluk Bintuni | 80,84 | 82,67 | 6,44 | 6,85 |
| Kab, Manokwari | 83,54 | 85,37 | 7,19 | 7,59 |
| Kab, Sorong Selatan | 87,90 | 88,07 | 7,90 | 7,90 |
| Kab, Sorong | 91,39 | 91,39 | 8,00 | 8,00 |
| Kab, Raja Ampat | 89,93 | 92,69 | 7,00 | 7,00 |
| Kota Sorong | 99,10 | 99,10 | 10,10 | 10,52 |
| PROV, PAPUA BARAT | 90,32 | 92,15 | 7,65 | 7,67 |

[Sumber: Susenas, 2007 dan 2008]

Selanjutnya, data pada Tabel 3.1 menunjukkan rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua Barat pada tahun 2007 dan 2008. Tampak bahwa Kota Sorong mempunyai rata-rata lama sekolah tertinggi (10,10 tahun dan 10,52 tahun) dan terendah di kabupaten Teluk Wondama (5,99 tahun dan 6,39 tahun). Hal ini menunjukkan disparitas capaian pendidikan antar kabupaten/kota. Pemerintah perlu mengupayakan agar pendidikan lebih bisa dinikmati secara merata di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat.

Tabel 3.2 menggambarkan pencapaian kualitas pendidikan dari usia 10 tahun atau lebih. Sampai tahun 2008,

tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagian besar penduduk di Papua Barat masih terbatas pendidikan tingkat dasar. Persentase penduduk 10 tahun atau lebih yang tidak memiliki ijazah masih cukup tinggi, mencapai 32,84 persen, sedangkan persentase penduduk yang memiliki ijazah perguruan tinggi hanya 4,79 persen. Kabupaten Sorong merupakan kabupaten dengan urutan tertinggi persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah (41,77 persen) dan yang terendah adalah Kota Sorong (16,85 persen). Persentase tertinggi penduduk yang hanya memiliki ijazah paling rendah (ijazah SD) adalah kabupaten Raja Ampat

Tabel 3.2 Ijazah tertinggi yang dimiliki penduduk di Provinsi Papua Barat Tahun 2008

| Kabupaten/Kota | Ijazah Tertinggi yang Dimiliki / <i>Certificate Possesion</i> | | | | |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | Tidak mempunyai ijazah / <i>Not Have</i> | SD / <i>PS</i> | SMP / <i>JHS</i> | SMA / <i>SHS</i> | PT / <i>University</i> |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Fak-Fak | 27,06 | 29,79 | 20,58 | 17,71 | 4,86 |
| Kaimana | 37,78 | 27,37 | 15,00 | 16,77 | 3,08 |
| Teluk Wondama | 38,27 | 28,68 | 15,63 | 13,44 | 3,98 |
| Teluk Bintuni | 33,30 | 23,21 | 21,52 | 18,93 | 3,04 |
| Manokwari | 41,66 | 19,07 | 17,33 | 16,48 | 5,46 |
| Sorong Selatan | 30,08 | 30,24 | 24,18 | 13,52 | 1,98 |
| Sorong | 41,77 | 24,90 | 16,85 | 13,99 | 2,49 |
| Raja Ampat | 28,89 | 45,08 | 15,54 | 9,05 | 1,44 |
| Kota Sorong | 16,85 | 17,49 | 21,17 | 34,20 | 10,28 |
| PAPUA BARAT | 32,84 | 25,68 | 18,16 | 18,54 | 4,79 |

[Sumber: BPS, Susenas 2008]

(45,08 persen), tetapi untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi justru sebaliknya.

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Meningkatnya APS menunjukkan adanya peningkatan dibidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pendidikan. Berdasarkan tabel 3.3 APS penduduk usia 7 - 12 tahun pada tahun 2008 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 92,64 persen menjadi 93,18 persen. Beberapa kabupaten/kota di Papua Barat ada yang mengalami peningkatan APS tetapi ada juga yang mengalami penurunan. Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan adalah kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong, Raja Ampat dan Kota Sorong, Sedangkan Kabupaten Sorong Selatan, Kaimana dan Fak-fak mengalami penurunan.

Pada tahun 2008, APS penduduk usia 13 –15 tahun juga mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 87,58 persen pada tahun 2007 menjadi 87,75 persen. APS 13–15 ta-

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Barat Tahun 2007 dan 2008

| Kabupaten/Kota | Angka Partisipasi Sekolah / School Enrollment Rate | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 7 - 12 Tahun | | 13 - 15 Tahun | | 16 - 18 Tahun | |
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Kab. Fak-Fak | 97,86 | 96,48 | 89,69 | 89,74 | 68,48 | 71,98 |
| Kab. Kaimana | 97,32 | 95,76 | 95,63 | 94,84 | 37,66 | 56,03 |
| Kab. Teluk Wondama | 89,19 | 90,62 | 83,13 | 84,79 | 46,58 | 49,32 |
| Kab. Teluk Bintuni | 87,41 | 90,34 | 83,80 | 87,95 | 31,63 | 34,06 |
| Kab. Manokwari | 87,05 | 88,32 | 82,14 | 84,04 | 54,99 | 56,80 |
| Kab. Sorong Selatan | 97,14 | 96,95 | 90,97 | 91,97 | 74,67 | 78,93 |
| Kab. Sorong | 95,08 | 95,75 | 83,78 | 87,15 | 36,36 | 36,92 |
| Kab. Raja Ampat | 88,10 | 90,74 | 84,78 | 82,26 | 25,00 | 31,03 |
| Kota Sorong | 96,16 | 96,70 | 93,84 | 95,67 | 76,85 | 79,32 |
| PROV. PAPUA BARAT | 92,64 | 93,18 | 87,58 | 88,75 | 57,84 | 57,53 |

[Sumber: BPS, Susenas 2007 dan 2008]

hun di Kota Sorong tertinggi di Papua Barat (95,67 persen), sedangkan APS 13–15 tahun terendah di Kabupaten Raja Ampat (82,26 persen). Selanjutnya di tahun yang sama, APS penduduk usia 16 –18 tahun Papua Barat justru menunjukkan penurunan yaitu dari 57,84 persen menjadi 57,53 persen. Banyaknya penduduk usia sekolah di Provinsi Papua Barat yang tidak melanjutkan sampai jenjang pendidikan SMA bisa diakibatkan oleh beberapa faktor misalnya faktor ekonomi keluarga, kesadaran masyarakat tentang pendidikan kurang, dan pernikahan usia dini.

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu yang dibagi kedalam umur jenjang kelompok pendidikan yaitu SD (7–12 tahun), SMP (13–15 tahun) dan SMA (16–18 tahun). Pada saat ini pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yaitu mulai SD sampai SMP (usia 7–15 tahun).

Secara umum APM pada periode 2007–2008 pada jenjang pendidikan SD mengalami peningkatan, dari 89,97 persen menjadi 90,71 persen (lihat Gambar 3.4). Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP mengalami penurunan yaitu dari 52,32 persen menjadi 48,92 persen dan SMA dari 44,80 persen menjadi 43,61 persen. Bila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, kabupaten Sorong Selatan mempunyai APM tertinggi untuk jenjang pendidikan SD tahun 2008 yaitu 96,95 persen, sedangkan yang terendah adalah kabupaten Teluk Bintuni (84,91 persen). Untuk jenjang pendidikan SMP tahun 2008, Kota Sorong menempati urutan teratas dengan APM tertinggi yaitu 77,53 persen, sedangkan urutan terbawah adalah Kabupaten Raja Ampat (15,77 persen). Yang terakhir adalah jenjang pendidikan SMA, Kota Sorong mempunyai APM tertinggi (64,38 persen) dibandingkan dengan kabupaten lain di Papua Barat.

Dari beberapa ulasan di atas, dapat dilihat bahwa pendidikan di Provinsi Papua Barat masih harus ditingkatkan. Berbagai macam faktor yang mengakibatkan rendahnya pendidikan penduduk Papua Barat sehingga harus segera diatasi karena pendidikanlah yang menjadi salah satu faktor kemajuan peradaban masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya yang mengarah pada perbaikan pendidikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah meningkatkan distribusi infrastruktur pendidikan sampai ke pelosok kabupaten/kota, program penyuluhan pendidi-

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat Tahun 2007 dan 2008

| Kabupaten/Kota | Angka Partisipasi Murni / Net Enrollment Rate | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | SD / PS | | SMP / JHS | | SMA / SHS | |
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| | (1) | (3) | (4) | (3) | (4) | (3) |
| Kab. Fak-Fak | 94,83 | 95,77 | 68,42 | 68,15 | 59,85 | 68,21 |
| Kab. Kaimana | 96,13 | 95,01 | 58,00 | 52,99 | 59,88 | 51,75 |
| Kab. Teluk Wondama | 87,03 | 86,98 | 28,92 | 31,63 | 24,66 | 32,85 |
| Kab. Teluk Bintuni | 86,26 | 84,91 | 45,33 | 41,32 | 23,03 | 14,25 |
| Kab. Manokwari | 83,99 | 87,32 | 45,26 | 48,69 | 36,92 | 45,44 |
| Kab. Sorong Selatan | 97,14 | 96,95 | 49,82 | 49,62 | 60,25 | 55,78 |
| Kab. Sorong | 91,80 | 94,68 | 43,24 | 53,86 | 22,73 | 18,46 |
| Kab. Raja Ampat | 88,10 | 89,23 | 15,22 | 15,77 | 6,25 | 23,82 |
| Kota Sorong | 91,12 | 92,77 | 72,37 | 77,53 | 68,84 | 64,38 |
| PROV. PAPUA BARAT | 89,97 | 90,71 | 52,32 | 48,92 | 44,80 | 43,61 |

[Sumber: BPS, Susenas 2007 dan 2008]

kan, program penyebaran guru berkualitas yang menetap sampai 10 tahun, peningkatan mutu pendidikan beserta para pendidiknyanya. Bahkan secara ekstrim, dibutuhkan peraturan daerah (Perda) yang mengikat semua *stakeholder*, agar anak usia sekolah harus duduk di bangku sekolah.

Di sisi lain, masyarakat adat perlu diberikan pemahaman pentingnya pendidikan bagi semua. Kasus pemalangan sekolah seperti yang terjadi di Manokwari tahun 2008 menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam membantu kelancaran proses belajar mengajar. Kepentingan ekonomi sekelompok masyarakat tidak sepatutnya mengalahkan kepentingan umum dan menghambat anak-anak dalam menerima hak dasar guna memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemerintah daerah juga dituntut untuk memberikan jaminan proses belajar mengajar tidak terganggu oleh masalah tuntutan tanah ulayat yang di atasnya berdiri gedung sekolah dan sarana pendidikan lain.



4. KETENAGAKERJAAN

Informasi ketenagakerjaan merupakan salah satu informasi strategis. Dikatakan informasi strategis karena informasi ketenagakerjaan dapat mengukur kinerja pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu indikator penting ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPT menggambarkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). TPAK menggambarkan persentase

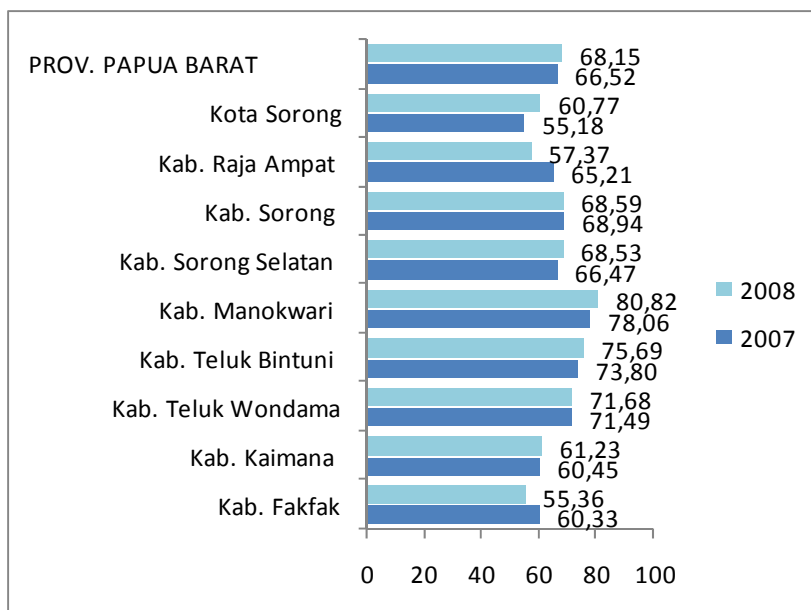
penduduk yang bekerja dan yang mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha di antara penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).

Meskipun data ketenagakerjaan bisa diperoleh dari data Susenas, tetapi BPS telah melakukan survei spesifik mengenai ketenagakerjaan yaitu survei angkatan kerja nasional (Sakernas). Oleh karena itu, sumber data ketenagakerjaan yang digunakan mengacu pada hasil Sakernas tahun 2007 dan 2008.

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) & TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Sejalan dengan penambahan penduduk Provinsi Papua Barat, jumlah penduduk usia kerja juga bertambah. Penduduk usia kerja pada tahun 2007 diperkirakan mencapai 445.226 jiwa meningkat menjadi 502.400 jiwa pada tahun 2008. TPAK juga meningkat dari 66,52 persen pada tahun 2007 menjadi 68,15 persen pada tahun 2008. Sebaliknya, TPT turun dari 9,46 persen menjadi 7,65 persen.

TPAK tahun 2007 dan 2008 tertinggi di Kabupaten Manokwari dan terendah di Kota Sorong pada tahun 2007 dan Kabupaten Fakfak pada tahun 2008. TPAK Kabupaten Manokwari tahun 2008 mencapai 80,82 persen sementara



Gambar 4.1
TPAK Provinsi
Papua Barat
Tahun 2007
dan 2008

TPAK Kabupaten Fakfak hanya 55,36 persen.

Berbanding terbalik dengan TPAK, TPT Kabupaten Manokwari terbilang cukup rendah, hanya 3,72 persen. Sebaliknya, TPT Kabupaten Fakfak pada tahun 2008 mencapai 13,66 persen, tertinggi di Provinsi Papua Barat.

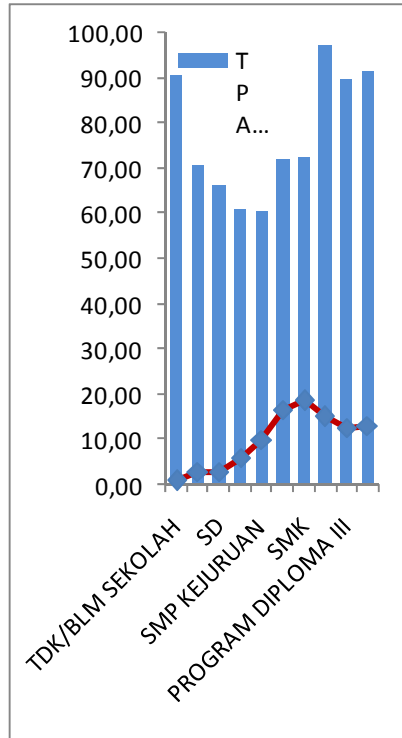
TPAK DAN TPT MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Perubahan status Kabupaten Manokwari menjadi ibu-kota Provinsi Papua Barat diikuti perbaikan indikator ketenagakerjaan. Hal ini terbukti dari peningkatan TPAK dan

penurunan TPT selama periode tahun 2007 dan 2008.

TPAK dan TPT menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan menunjukkan pola yang berbeda. TPAK untuk tingkat pendidikan SMA ke atas lebih tinggi daripada TPAK

Gambar 4.2
TPAK dan TPT
Menurut Tingkat
Pendidikan Tahun
2008



pada tingkat pendidikan SMP ke bawah. Demikian juga TPT pada kelompok pendidikan SMA ke atas lebih tinggi daripada TPT pada kelompok pendidikan SMP ke bawah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pengangu-

ran terdidik di Provinsi Papua Barat cukup mengawatirkan. Peningkatan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, output yang dihasilkan dari akses terhadap pendidikan tinggi tersebut belum diimbangi



5. KEMISKINAN

JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Tujuan pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah berkurangnya penduduk miskin. Penurunan jumlah penduduk miskin dapat dimaknai peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan kenaikan harga-harga, garis kemiskinan dari tahun 2007 ke tahun 2008 naik. Tabel 5.1 menunjukkan garis kemiskinan selama periode tahun 2007 dan 2008 naik 31,55 persen. Meskipun begitu, kenaikan garis kemiskinan tidak diikuti oleh kenaikan persentase penduduk miskin. Dapat dikatakan bahwa kenaikan garis

Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Miskin , Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007 dan 2008

| Kabupaten/Kota | Jumlah | | Persentase | | Garis | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | Penduduk Miskin / | | Penduduk Miskin / | | Kemiskinan / | |
| | <i>The Number of</i> | | <i>The Percentage of</i> | | <i>Poverty Line</i> | |
| | <i>Poor People (000)</i> | | <i>Poor People</i> | | <i>(Rp.)</i> | |
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Kab. Fak-Fak | 24,71 | 24,47 | 39,57 | 37,55 | 270 365 | 245 342 |
| Kab. Kaimana | 13,73 | 10,61 | 35,22 | 23,25 | 211 324 | 216 657 |
| Kab. Teluk Wondama | 11,46 | 11,98 | 53,34 | 47,36 | 186 128 | 227 686 |
| Kab. Teluk Bintuni | 25,92 | 30,06 | 51,37 | 50,39 | 247 951 | 274 014 |
| Kab. Manokwari | 76,35 | 82,62 | 47,34 | 43,57 | 278 175 | 289 442 |
| Kab. Sorong Selatan | 16,00 | 16,37 | 28,05 | 26,66 | 165 792 | 204 720 |
| Kab. Sorong | 31,01 | 32,55 | 33,84 | 33,95 | 160 706 | 213 899 |
| Kab. Raja Ampat | 11,44 | 10,45 | 30,07 | 23,76 | 217 042 | 220 837 |
| Kota Sorong | 56,19 | 18,19 | 35,71 | 14,93 | 392 698 | 387 984 |
| PROV. PAPUA BARAT | 266,80 | 237,30 | 39,31 | 33,49 | 205 998 | 270 990 |

[Sumber: BPS, Susenas 2007 dan 2008]

kemiskinan dapat diimbangi oleh kenaikan pendapatan dan daya beli masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Beberapa kabupaten/kota yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin adalah Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong. Kabupaten lainnya belum berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin. Kenaikan jumlah penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Manokwari. Jumlah penduduk

miskin di Kabupaten Manokwari naik 8,21 persen selama periode tahun 2007 dan 2008.

Persentase jumlah penduduk miskin belum cukup untuk dijadikan sebagai indikator kemiskinan, ada dua indikator lainnya yaitu indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Persentase Penduduk miskin memang dapat memberikan gambaran proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tetapi angka ini tidak dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kemiskinan yang dialami penduduk miskin mengingat angka ini tidak akan berubah ketika seorang yang awalnya miskin menjadi semakin miskin.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilakukan dengan cara mengurangi jumlah penduduk miskin tetapi juga mengurangi jarak kemiskinan dengan garis kemiskinan serta mengurangi tingkat keparahan kemiskinan. Oleh karena itu indikator lainnya yang digunakan untuk analisis kemiskinan yaitu indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) merupakan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan dan dinyatakan

sebagai rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap perubahan distribusi pendapatan dari penduduk miskin sehingga memerlukan indikator lain untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P_2).

Penurunan pada P_1 menunjukkan bahwa jarak antara tingkat pendapatan penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa tingkat pendapatan penduduk miskin semakin meningkat. Berdasarkan Tabel 5.2, indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Barat dari tahun 2007 ke tahun 2008 turun dari 12,97 ke 10,83.

Tabel 5.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun

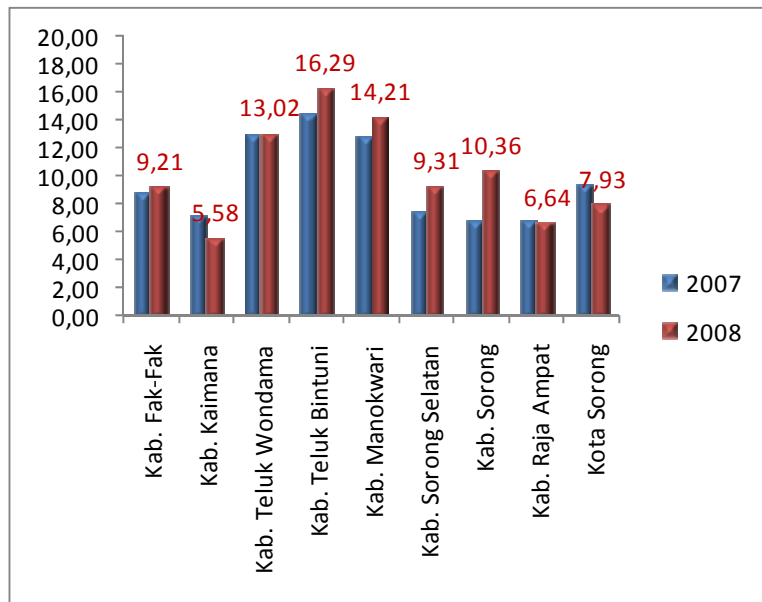
| Kabupaten/Kota | Indeks Kedalaman Kemiskinan / Poverty Gap Index (P1) | | Indeks Keparahan Kemiskinan / Poverty Severity Index (P2) | |
|--------------------------|--|--------------|---|-------------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (1) | | | | |
| Kab. Fakfak | 8,79 | 9,21 | 3,12 | 2,98 |
| Kab. Kaimana | 7,31 | 5,58 | 2,12 | 1,65 |
| Kab. Teluk Wondama | 13,02 | 13,02 | 4,30 | 4,42 |
| Kab. Teluk Bintuni | 14,59 | 16,29 | 5,58 | 7,32 |
| Kab. Manokwari | 12,75 | 14,21 | 4,53 | 5,94 |
| Kab. Sorong Selatan | 7,48 | 9,31 | 2,91 | 3,71 |
| Kab. Sorong | 6,83 | 10,36 | 1,89 | 3,65 |
| Kab. Raja Ampat | 6,84 | 6,64 | 1,89 | 2,31 |
| Kota Sorong | 9,41 | 7,93 | 3,55 | 4,94 |
| PROV. PAPUA BARAT | 12,97 | 10,83 | 5,66 | 4,55 |

[Sumber: BPS, Susenas 2007 dan 2008.]

Hal ini berarti tingkat pendapatan penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sorong mengalami kenaikan terbesar jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Papua Barat yaitu sebesar 3,53 persen. Sedangkan Kabupaten yang mengalami penurunan indeks kedalaman kemiskinan adalah Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, dan Kota Sorong (lihat Gambar 5.1).

Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat dari tahun 2007 ke tahun 2008 juga turun. Penurunan kedua indikator kemiskinan ini menunjukkan bahwa ting-



Gambar 5.1
Indeks Kedalaman
Kemiskinan Tahun
2007-2008

kat kedalaman dan keparahan dari insiden kemiskinan di Provinsi Papua Barat semakin berkurang.

PERKEMBANGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat akan mempengaruhi kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan dari Rp 363.582 pada tahun 2007 menjadi Rp. 471.214 pada tahun 2008 (lihat Tabel 5.3). Terjadi peningkatan sebesar 29,60 persen pada rata-rata pengeluaran per kapita per bulan.

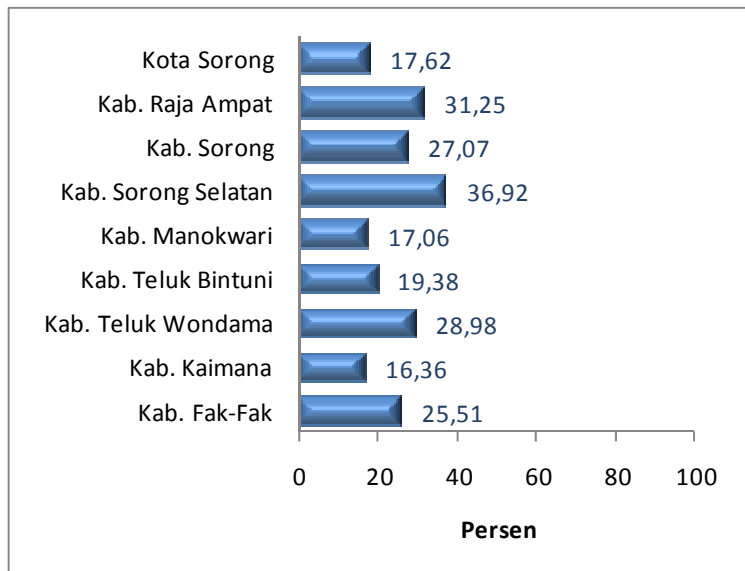
Tabel 5.3 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan dan Rasio Gini Tahun 2007-2008

| Kabupaten/Kota | Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per bulan / <i>Monthly Expenditure Per Capita</i> | | Rasio Gini / <i>Gini Ratio</i> | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------------------|-------------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| Kab. Fakfak | 325 282 | 408 268 | 0,20 | 0,31 |
| Kab. Kaimana | 289 502 | 336 853 | 0,35 | 0,42 |
| Kab. Teluk Wondama | 331 246 | 427 226 | 0,23 | 0,33 |
| Kab. Teluk Bintuni | 349 250 | 416 919 | 0,24 | 0,28 |
| Kab. Manokwari | 355 428 | 416 060 | 0,38 | 0,40 |
| Kab. Sorong Selatan | 235 830 | 322 910 | 0,30 | 0,30 |
| Kab. Sorong | 295 059 | 374 940 | 0,18 | 0,27 |
| Kab. Raja Ampat | 195 896 | 257 113 | 0,21 | 0,17 |
| Kota Sorong | 528 035 | 621 057 | 0,23 | 0,17 |
| PROV. PAPUA BARAT | 363 582 | 471 214 | 0,33 | 0,36 |

[Sumber: BPS, Susenas 2007 dan 2008]

Kenaikan pun terjadi pada semua Kabupaten/Kota di Papua Barat (lihat Gambar 5.2). Kenaikan terbesar terjadi di Kabupaten Sorong Selatan yaitu sebesar 36,92 persen sedangkan yang terkecil di Kabupaten Kaimana.

Tingkat pendapatan pada masyarakat menunjukkan tingkat kemakmuran. Oleh karena sulitnya mendapatkan data pendapatan yang akurat maka dilakukan pendekatan melalui tingkat pengeluaran. Walaupun tingkat pengeluaran tidak seluruhnya menggambarkan tingkat pendapatan sebenarnya pada masyarakat tetapi paling tidak dapat digunakan untuk melihat arah perkembangan perekonomian pada masyarakat.



Gambar 5.2
Persentase Kenaikan
Rata-Rata
Pengeluaran
Perkapita Perbulan
dari Tahun 2007
sampai 2008

Ada dua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Indikator yang pertama adalah indikator yang digunakan oleh Bank dunia yaitu dengan memperhatikan persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah.

Indikator yang kedua adalah Indeks Gini. Indeks gini adalah indeks yang bernilai antara 0 dan 1, jika indeks ini semakin mendekati 0 maka tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, dan begitu sebaliknya jika indeks gini semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan yang terjadi semakin tinggi. Kenaikan Rasio Gini terjadi di semua Kabupaten/Kota di Papua Barat.

Berdasarkan Tabel 5.3 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan indeks gini dari 0,33 pada tahun 2007 menjadi 0,36 di tahun 2008, yang menunjukkan pengertian bahwa terjadi kenaikan ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran. Selain Indeks Gini, ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran juga dapat diukur dari indikator yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

Bank Dunia mengelompokkan pendapatan penduduk dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan

yaitu ; 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dari perbandingan jumlah pendapatan penduduk dari kelompok berpendapatan 40 persen terendah dengan total pendapatan seluruh penduduk.

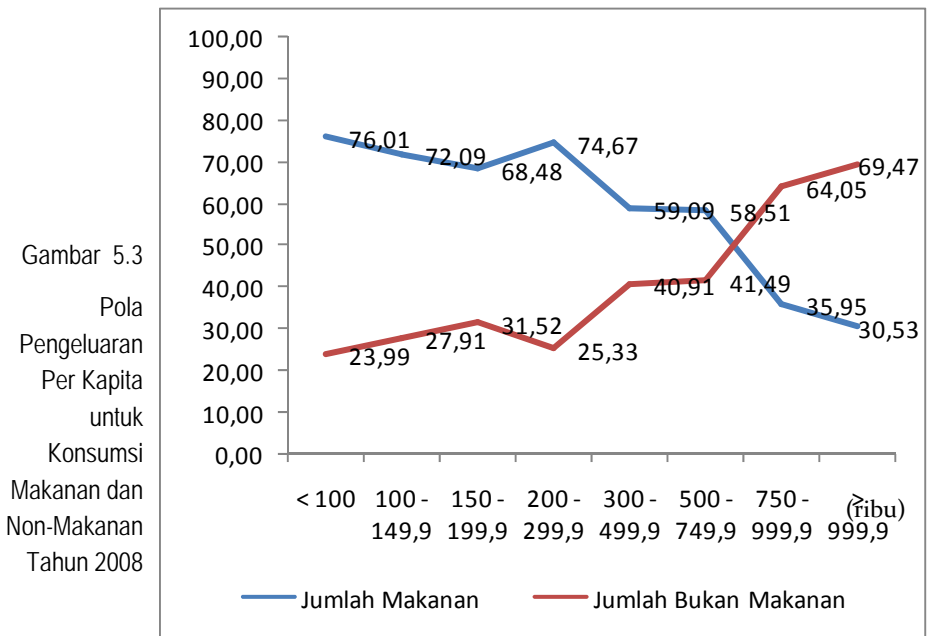
Tabel 5.4 Persentase Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga dari Tahun 2007-2008

| Kabupaten/Kota | Persentase Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga / <i>The Percentage of Household Expenditures</i> | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 40 % terbawah | | 40 % Menengah | | 20 % Teratas | |
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Kab. Fakfak | 29,44 | 37,41 | 46,14 | 39,26 | 24,42 | 23,33 |
| Kab. Kaimana | 26,17 | 25,81 | 39,12 | 44,41 | 34,72 | 29,78 |
| Kab. Teluk Wondama | 32,22 | 24,35 | 45,98 | 49,79 | 21,80 | 25,85 |
| Kab. Teluk Bintuni | 33,03 | 32,60 | 40,67 | 46,48 | 26,30 | 20,93 |
| Kab. Manokwari | 22,07 | 27,36 | 47,61 | 43,27 | 30,32 | 29,38 |
| Kab. Sorong Selatan | 31,03 | 30,22 | 45,12 | 48,91 | 23,85 | 20,87 |
| Kab. Sorong | 36,29 | 26,84 | 40,45 | 45,62 | 23,25 | 27,54 |
| Kab. Raja Ampat | 39,07 | 34,97 | 39,39 | 41,91 | 21,54 | 23,12 |
| Kota Sorong | 30,45 | 29,45 | 43,56 | 40,95 | 25,99 | 29,59 |
| PROV. PAPUA BARAT | 28,29 | 29,61 | 44,59 | 43,09 | 27,13 | 27,30 |

[Sumber: BPS, Susenas 2007 dan 2008]

Pendapatan yang dimaksud didekati oleh pengeluaran. Berdasarkan data pada Tabel 5.4 diperoleh bahwa dari 40 persen kelompok rumah tangga berpengeluaran terendah, bagian dari seluruh pendapatan yang dinikmati

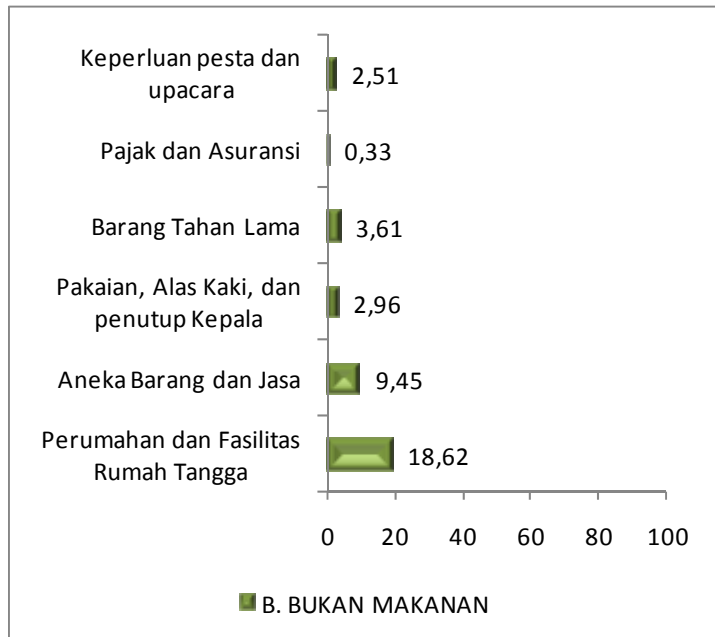
hanya sebesar 28,29 persen di tahun 2007 dan meningkat menjadi 29,61 di tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi tergolong rendah karena melebihi angka 17 persen. Sedangkan jika diamati secara parsial, maka hanya Kabupaten Fak-Fak dan Manokwari yang mengalami penurunan ketimpangan pendapatan karena persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen rumah tangga yang berpendapatan rendah mengalami kenaikan, yaitu untuk Kabupaten Fak-Fak meningkat dari 29,44 persen (tahun 2007) menjadi 37,41 persen (tahun 2008) dan untuk Kabupaten Manokwari dari 22,07 persen menjadi 27,36 persen di tahun 2008.



Sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang lainnya mengalami peningkatan ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran yang berarti juga terjadi kenaikan ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan pola konsumsi penduduk Papua Barat pada Gambar 5.3, menunjukkan bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran, persentase konsumsi makanan semakin rendah dan begitu sebaliknya. Sedangkan semakin besar pengeluaran maka semakin kecil pengeluaran atau konsumsi untuk makanan dan semakin besar pula pengeluaran non-makanan.

Gambar 5.4
Pola Pengeluaran
Per kapita untuk Konsumsi Non-Makanan
Tahun 2008



Sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi non-makanan paling besar yaitu perumahan dan fasilitas rumah tangga (18,62 persen), sedangkan lainnya adalah pengeluaran untuk aneka barang dan jasa (9,45 persen), pakaian, alas kaki, dan penutup kepala (2,96 persen), barang tahan lama (3,61 persen), pajak dan asuransi (0,33 persen), dan sebesar 2,51 persen untuk keperluan pesta dan upacara (selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5.4).



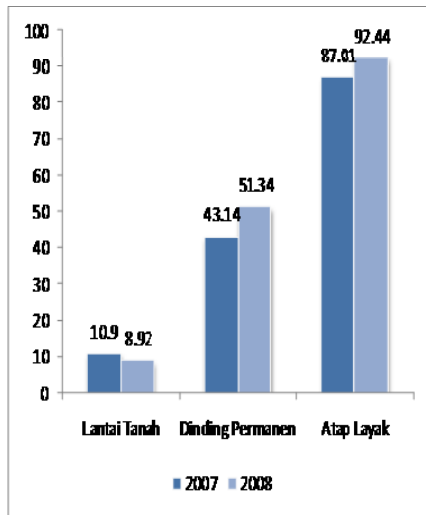
6. PERUMAHAN

Sebagai salah satu dari tiga kebutuhan pokok manusia, rumah memiliki fungsi yang sangat penting. Rumah merupakan tempat perlindungan dari hujan, sinar matahari, atau suhu dingin/panas yang ekstrim. Selain itu, rumah juga sebagai tempat perlindungan dari penularan penyakit dan perlindungan dari gangguan luar seperti pencurian atau tindak kekerasan. Rumah sebagai tempat permulaan anak manusia berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lain.

Tidak seperti pertumbuhan manusia, pertumbuhan rumah lebih lambat. Pertumbuhan rumah dibatasi oleh faktor tanah sebagai *fixed resources*. Kuantitas tanah tetap dan akan terus berkurang seiring dengan pertumbu-

han manusia yang mengikuti deret ukur. Akibatnya, perkembangan kualitas rumah dari tahun ke tahun senantiasa berubah.

KUALITAS PERUMAHAN



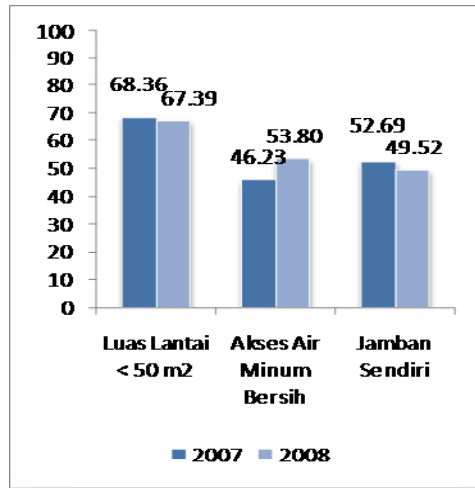
Gambar 6.1
Indikator Rumah Layak di Provinsi Papua Barat, 2007—2008

Kualitas rumah mengindikasikan tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas rumah ditentukan bukan hanya oleh fisik bangunan tetapi juga oleh derajat kesehatan rumah. Rumah dengan kualitas yang baik minimal me-

enuhi persyaratan lantai, dinding dan atap yang layak. Selain itu, rumah yang baik juga harus cukup pencahayaan, aliran udara bebas keluar dan masuk, dan sistem pembuangan limbah yang baik.

Kualitas perumahan di Provinsi Papua Barat tahun 2008 menunjukkan peningkatan berdasarkan tiga indikator pokok rumah layak, yaitu berlantai bukan tanah, berdin-

ding permanen dan beratap bukan dedaunan. Gambar 6.1 menunjukkan persentase rumah berlantai tanah turun dari 10,90 persen pada tahun 2007 menjadi 8,92 persen pada tahun 2008. Sebaliknya, rumah berdinding permanen meningkat dari 43,14 persen pada tahun 2007 menjadi 51,34



Gambar 6.2
 Fasilitas Rumah di
 Provinsi Papua Barat,
 2007—2008

persen pada tahun 2008. Demikian juga persentase rumah beratap layak meningkat dari 87,01 persen pada tahun 2007 menjadi

92,44 persen pada tahun 2008.

Selain kelayakan rumah, kualitas rumah juga ditentukan oleh fasilitas yang ada. Sebagai contoh luas lantai, akses terhadap sumber air minum bersih dan keberadaan jamban sendiri.

Perbaikan kualitas perumahan di Provinsi Papua Barat tercermin juga dengan penurunan persentase rumah

dengan luas lantai kurang dari 50 meter per segi. Selain itu, persentase rumah tangga dengan akses air minum bersih juga meningkat (Perhatikan Gambar 6.2).

PENERANGAN

Aspek penting lain dari perumahan adalah masalah penerangan di malam hari. Meskipun di beberapa wilayah di Provinsi Papua Barat kaya sumber daya air tetapi air untuk pembangkit listrik belum dimanfaatkan. Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih mengandalkan diesel untuk pembangkit listrik. Akibatnya, Provinsi Papua Barat menghadapi kekurangan daya setiap tahunnya.

Persentase rumah tangga yang mengakses listrik PLN pada tahun 2008 sekitar 62,21 persen. Itu artinya tiga dari lima rumah tangga di Papua Barat yang mendapat pelayanan PLN.

Layanan PLN di Provinsi Papua Barat belum merata. Tabel 6.1 menyatakan persentase rumah tangga menurut sumber penerangan di malam hari yang dirinci menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2008. Di Kabupaten Manokwari sebagai ibukota provinsi, layanan PLN dinikmati oleh separuh rumah tangga. Di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Teluk Wondama yang menerapkan

listrik menyala separuh hari, layanan PLN baru dinikmati oleh 30–36 persen rumah tangga. Persentase rumah tangga yang menikmati layanan PLN hanya 8,41 persen. Layanan PLN telah banyak dinikmati oleh rumah tangga di Kota Sorong (95,54 persen), Kabupaten Fakfak (75,77 persen) dan Kabupaten Sorong (71,55 persen).

Tabel 6.1 juga menyatakan persentase rumah tangga pengguna pelita/obor/sentir masih tinggi (22,03 persen). Pelita/obor/sentir menjadi alternatif terbanyak yang digunakan rumah tangga sebagai pengganti listrik PLN.

Tabel 6.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Malam Hari di Provinsi Papua Barat Tahun 2008

| Kabupaten/Kota | Sumber Penerangan | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | Listrik PLN | Listrik Non PLN | Petromak/ Aladin | Pelita/ sentir/ obor | Lainnya |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Kab. Fak-Fak | 75,77 | 9,21 | 1,37 | 13,64 | 0,00 |
| Kab. Kaimana | 52,88 | 17,88 | 0,85 | 28,11 | 0,28 |
| Kab. Teluk Wondama | 30,67 | 23,57 | 3,77 | 40,10 | 1,89 |
| Kab. Teluk Bintuni | 19,09 | 59,11 | 4,99 | 9,94 | 6,87 |
| Kab. Manokwari | 58,17 | 2,94 | 0,89 | 37,11 | 0,89 |
| Kab. Sorong Selatan | 36,29 | 9,74 | 1,07 | 51,81 | 1,07 |
| Kab. Sorong | 71,55 | 0,00 | 0,00 | 26,07 | 2,37 |
| Kab. Raja Ampat | 8,41 | 15,42 | 18,98 | 56,13 | 1,07 |
| Kota Sorong | 95,54 | 2,67 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| PROV. PAPUA BARAT | 62,21 | 12,68 | 2,09 | 22,03 | 0,99 |

[Sumber: BPS, Susenas 2008]

Tampak bahwa penggunaan sumber penerangan ini banyak ditemukan di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan. Persentase penggunaan pelita/obor/sentir di kedua kabupaten tersebut 56,13 persen (Kabupaten Raja Ampat) dan 51,81 persen (Kabupaten Sorong Selatan).

Permasalahan listrik di Kabupaten Sorong Selatan sesungguhnya dapat diatasi. Kabupaten Sorong Selatan mempunyai potensi air terjun yang cukup. Air Terjun di Kohoin atau di Distrik Aifat Timur sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Debit air di kedua air terjun tersebut cukup untuk menggerakkan turbin.

SANITASI LINGKUNGAN

Rumah yang sehat didukung oleh sanitasi lingkungan yang baik. Pengelolaan limbah feces dari rumah tangga misalnya, apabila dilakukan dengan baik akan menghindarkan rumah tangga tersebut dan masyarakat dari wabah diare.

Data Susenas 2008 menginformasikan bahwa lebih dari separuh rumah tangga di Provinsi Papua telah memanfaatkan tangki/SPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Itu artinya, masih ada hampir separuh rumah tangga yang menggunakan selain tangki/SPAL untuk menampung

tinja.

Tabel 6.2 menyatakan persentase rumah tangga di Provinsi Papua Barat menurut penggunaan tempat akhir penampungan tinja pada tahun 2008. Tampak bahwa masih banyak masyarakat yang memanfaatkan sungai/danau/laut untuk membuang tinja. Persentasenya bahkan mencapai 16,40 persen. Di sisi lain, masih banyak rumah tangga yang memfungsikan sungai untuk kebutuhan rumah tangga seperti mencuci piring, mandi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, masyarakat di desa Senopi Distrik Senopi Kabupaten Manokwari memanfaatkan Kali (sungai) Kasih untuk

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Penampungan Akhir Tinja di Provinsi Papua Barat Tahun 2008.

| Kabupaten/kota | Tempat Pembuangan Akhir Tinja | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|
| | Tangki/ spal | Kolam/ sawah | Sungai/ danau/ laut | Lobang tanah | Pantai/ tanah lapang/ kebun | Lainnya |
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Kab. Fakfak | 35,27 | 0,68 | 17,20 | 35,95 | 9,88 | 1,02 |
| Kab. Kaimana | 44,61 | 1,40 | 9,65 | 15,88 | 16,65 | 11,81 |
| Kab. Teluk Wondama | 26,90 | 0,94 | 43,40 | 10,37 | 14,62 | 3,77 |
| Kab. Teluk Bintuni | 45,40 | 0,00 | 8,00 | 16,79 | 1,15 | 28,66 |
| Kab. Manokwari | 41,16 | 1,12 | 10,53 | 20,08 | 26,20 | 0,91 |
| Kab. Sorong Selatan | 34,29 | 2,15 | 18,82 | 29,56 | 14,09 | 1,09 |
| Kab. Sorong | 33,70 | 2,36 | 7,69 | 47,95 | 8,29 | 0,00 |
| Kab. Raja Ampat | 55,87 | 0,00 | 7,46 | 15,94 | 19,69 | 1,05 |
| Kota Sorong | 86,06 | 1,49 | 6,52 | 2,67 | 0,30 | 2,97 |
| Prov. Papua Barat | 52,13 | 1,23 | 16,40 | 15,36 | 10,00 | 4,89 |

[Sumber: BPS, Susenas 2008]

memasak, mencuci pakaian, mencuci piring dan mandi. Demikian juga masyarakat di Desa Siakwa Distrik Miyah Kabupaten Sorong yang memanfaatkan Kali Kamundan untuk aktifitas serupa.



7. INFORMASI SOSIAL LAINNYA

Dalam era globalisasi yang terjadi dewasa ini, teknologi dan media telekomunikasi berkembang begitu cepat mulai dari telepon rumah, telepon seluler/ handphone, komputer (PC), laptop/notebook, internet, dsb. Dengan berkembangnya teknologi dan media telekomunikasi tersebut, maka secara sedikit demi sedikit akan menggeser media konvensional yang ada seperti surat kabar, mesin ketik, dsb. Keuntungan yang bisa kita peroleh dari pemakaian teknologi sekarang dibanding teknologi konvensional adalah lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Namun, perkembangan teknologi tersebut masih belum populer di kalangan masyarakat khususnya masyarakat di provinsi Papua Barat. Hal ini bisa dilihat dari masih

kecilnya persentase rumah tangga yang menguasai dan memanfaatkan teknologi yang ada. Tabel 7.1 menunjukkan bahwa secara umum rumah tangga di Provinsi Papua Barat yang menguasai komputer (PC dan laptop) hanya 5,49 persen dimana Kabupaten Manokwari merupakan kabupaten dengan urutan tertinggi dengan persentase 11,07 persen, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Raja Am-

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Alat Komunikasi Informasi Teknologi Informasi di Provinsi Papua Barat Tahun 2007 dan 2008

| Kabupaten/Kota | Jenis Alat Komunikasi dan Informasi / <i>Communication and Information Goods</i> | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|---|--------------|-------------------------------|-------------|
| | Telepon / <i>Telephone</i> | | Telepon Selular / <i>Mobile Cellular</i> | | Komputer / <i>Computer</i> | |
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4) | (5) |
| Kab. Fak-Fak | 16,20 | 17,00 | 37,88 | 51,58 | 1,27 | 3,67 |
| Kab. Kaimana | 8,55 | 6,11 | 21,27 | 43,94 | 3,70 | 7,78 |
| Kab. Teluk Wondama | 0,78 | 0,47 | 13,28 | 23,60 | 0,39 | 2,84 |
| Kab. Teluk Bintuni | 0,81 | 1,53 | 22,68 | 45,85 | 0,42 | 10,27 |
| Kab. Manokwari | 10,43 | 7,52 | 34,21 | 46,09 | 7,14 | 11,07 |
| Kab. Sorong Selatan | 3,57 | 2,63 | 6,27 | 21,24 | 0,54 | 1,07 |
| Kab. Sorong | 4,68 | 2,36 | 24,86 | 49,09 | 3,24 | 2,37 |
| Kab. Raja Ampat | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 0,00 | 0,52 |
| Kota Sorong | 20,86 | 22,54 | 59,31 | 79,95 | 6,18 | 6,22 |
| PROV. PAPUA BARAT | 10,80 | 10,63 | 33,56 | 50,68 | 4,41 | 5,49 |

[Sumber: Susenas, 2007 dan 2008]

pat (0,52 persen). Selain mahal nya harga PC dan laptop, minim nya informasi dan jenis pekerjaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi sedikit nya penduduk yang memanfaatkan media ini.

Penggunaan telepon seluler untuk media telekomunikasi pada saat ini lebih populer dibanding telepon rumah/telepon biasa atau *fixed phone* meskipun harga telepon seluler maupun pulsanya lebih mahal. Telepon seluler banyak diminati karena lebih praktis dibawa kemana saja sehingga memudahkan pengguna berkomunikasi dimanapun dan kapanpun berada dengan ditunjang oleh jangkauan jaringan yang semakin meluas sampai ke pelosok daerah. Hal ini bisa ditunjukkan dari lebih rendahnya rumah tangga yang memakai telepon biasa dibandingkan telepon seluler.

Berdasarkan data pada Tabel 7.1, persentase rumah tangga yang memakai telepon seluler di Papua Barat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan telepon biasa yaitu 50,68 persen dibanding 10,63 persen. Bila dibandingkan menurut kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua Barat, persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan telepon rumah dan telepon seluler berada di Kota Sorong yaitu masing-masing berkisar 22,54 persen dan 79,95 persen.

Sedangkan persentase yang paling rendah adalah Kabupaten Raja Ampat di mana belum ada satupun rumah tangga yang menggunakan telepon biasa dan hanya 12,11 persen yang menggunakan telepon seluler.

Kemajuan teknologi telah membawa perkembangan kecepatan penyampaian informasi yaitu melalui media internet. Dengan internet, informasi diseluruh dunia tempo dulu sampai yang terbaru bisa diakses hanya dengan duduk didepan komputer tanpa harus berkeliling dunia yang tentunya membutuhkan biaya, tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, di internet kita bisa mencari berbagai macam hal yang kita inginkan misalnya uang, buku, peralatan, dsb baik itu tanpa biaya (gratis) maupun dengan biaya. Kemudahan akses informasi melalui internet ini ternyata belum dinikmati seluruh masyarakat di provinsi Papua Barat atau masih terbatas pada kalangan tertentu saja. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 7.2. Secara umum rumah tangga yang menggunakan internet baik melalui telepon rumah, telepon seluler/handphone, jasa war-net maupun melalui fasilitas kantor belum mencapai 10 persen dari total rumah tangga yang ada di provinsi Papua Barat. Masih minimnya pemakai internet ini menunjukkan rendahnya pengetahuan internet penduduk Papua Barat.

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Internet Menurut Media Akses Internet di Provinsi Papua Barat Tahun 2008

| Kabupaten/Kota | Media Akses Internet <i>Internet Acces Tools</i> | | | |
|--------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | Telepon/ <i>Telephone</i> | Telepon Selular/ <i>Mobile Celuler</i> | Warnet/ <i>Internet Rental</i> | Kantor/ <i>Office</i> |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Kab. Fakfak | 0,46 | 4,57 | 0,00 | 0,46 |
| Kab. Kaimana | 0,00 | 2,53 | 0,36 | 0,00 |
| Kab. Teluk Wondama | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 |
| Kab. Teluk Bintuni | 0,41 | 8,13 | 0,00 | 4,47 |
| Kab. Manokwari | 0,55 | 0,82 | 2,19 | 2,19 |
| Kab. Sorong Selatan | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 1,16 |
| Kab. Sorong | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 0,59 |
| Kab. Raja Ampat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kota Sorong | 0,87 | 1,45 | 2,32 | 1,74 |
| Prov. Papua Barat | 0,40 | 5,26 | 1,08 | 1,48 |

[Sumber: Susenas, 2008]

Penggunaan internet di Papua Barat melalui telepon rumah masih rendah, hanya 0,40 persen. Ini berarti dari 100 rumah tangga di Papua Barat, hanya 1 rumah tangga yang menggunakan internet melalui telepon rumah. Mahalnya biaya adalah faktor yang menyebabkan hal tersebut. Dari 9 kabupaten/kota yang ada di Papua Barat, kota Sorong mempunyai persentase tertinggi penggunaan telepon rumah untuk internet, 0,87 persen.

Selain menggunakan telepon rumah, akses internet juga bisa menggunakan media telepon seluler atau hand-

phone. Dibandingkan dengan media lain, telepon seluler untuk akses internet lebih banyak diminati. Hal ini dikarenakan telepon seluler yang berkembang dewasa ini sudah dilengkapi fasilitas internet yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun berada. Persentase rumah tangga di Papua Barat yang menggunakan telepon seluler sebagai media akses internet sudah mencapai 5,26 persen dimana kabupaten Teluk Bintuni menempati urutan teratas (8,13 persen) sedangkan urutan terbawah adalah kabupaten Raja Ampat (0 persen) atau bisa diartikan dengan tidak ada satupun rumah tangga di kabupaten Raja Ampat yang menggunakan telepon seluler untuk akses internet. Persentase ini kemungkinan akan berubah dan justru akan terus bertambah seiring bertambahnya pemakai telepon seluler.

Perkembangan internet, ternyata dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk membuka lapangan usaha yaitu dengan mendirikan Warung Internet atau lebih populer disebut Warnet. Keuntungan yang didapat dari usaha warnet ini ternyata lumayan besar, apalagi keberadaan warnet di daerah Papua Barat masih terbatas. Jika dipersentase dengan jumlah total rumah tangga yang ada di Papua Barat, penggunaan warnet untuk internet masih rendah,

hanya 1,08 persen. Kota Sorong yang notabeneanya merupakan kabupaten/kota yang paling maju di Papua Barat mempunyai persentase terbesar rumah tangga yang menggunakan jasa warnet untuk akses internet yaitu sebesar 2.32 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat telah membawa pertumbuhan kuantitas perkantoran yang ada. Para karyawan yang bekerja di kantor-kantor tersebut, kebanyakan menggunakan fasilitas kantor untuk akses internet. Kecepatan akses informasi dan komunikasi melalui internet menjadi salah satu pertimbangan perusahaan atau instansi pemerintah untuk melengkapi gedung kantor dengan fasilitas internet. Akses internet melalui fasilitas kantor di Papua Barat mencapai 1,48 persen. Angka ini bisa dibilang kecil karena Provinsi Papua Barat merupakan provinsi baru yang sedang berkembang.

Jika dibandingkan menurut kabupaten/kota, kabupaten/kota yang banyak menggunakan fasilitas kantor untuk internet adalah kabupaten Teluk Bintuni (4,47 persen). Kantor PDE (Pengolahan Data Elektronik) Kabupaten Teluk Bintuni terbilang aktif memutakhirkan situs resmi Kabupaten Teluk Bintuni terkait dengan pelaksanaan program-program pembangunan menuju Bintuni baru.



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT 2008

I

(1) Indikator Kependudukan

Population Indicators

Tabel A.1 Persentase Luas Kabupaten/Kota Terhadap Luas Papua Barat dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007 dan 2008

| Kabupaten/Kota Regency/Municipality | Persentase Terhadap Luas Papua Barat <i>Percentage to Total Area of Papua Barat</i> | Kepadatan Penduduk (jiwa per Km ²) <i>Population Density (person per Km²s)</i> | |
|--|--|---|-------------|
| | | 2007 | 2008 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Kab. Fak-Fak | 9,95 | 4,58 | 4,67 |
| Kab. Kaimana | 12,85 | 2,23 | 2,27 |
| Kab. Teluk Wondama | 8,44 | 1,87 | 1,91 |
| Kab. Teluk Bintuni | 12,95 | 2,83 | 2,93 |
| Kab. Manokwari | 10,04 | 11,74 | 11,96 |
| Kab. Sorong Selatan | 20,71 | 2,03 | 2,06 |
| Kab. Sorong | 20,07 | 3,35 | 3,42 |
| Kab. Raja Ampat | 4,23 | 6,68 | 6,77 |
| Kota Sorong | 0,77 | 150,14 | 153,19 |
| PROV. PAPUA BARAT | 100,00 | 4,97 | 5,07 |

[Diolah dari berbagai sumber]



(1) Indikator Kesehatan

Health Indicators

Tabel B.1 Angka Harapan Hidup Penduduk Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007 dan 2008

| Kabupaten/Kota | Angka harapan hidup (tahun) | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| | 2007 | 2008 |
| (1) | (2) | (3) |
| Kab. Fakfak | 69,27 | 69,81 |
| Kab. Kaimana | 69,06 | 69,26 |
| Kab. Teluk Wondama | 66,78 | 67,00 |
| Kab. Teluk Bintuni | 67,26 | 67,55 |
| Kab. Manokwari | 67,12 | 67,38 |
| Kab. Sorong Selatan | 66,19 | 66,33 |
| Kab. Sorong | 66,71 | 67,12 |
| Kab. Raja Ampat | 65,15 | 65,43 |
| Kota Sorong | 70,75 | 71,12 |
| PROV. PAPUA BARAT | 67,60 | 67,90 |

[Sumber: BPS, Susenas 2007 dan 2008]



(2) Indikator Kesehatan

Health Indicators

Tabel B.2 Angka Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan di Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007 dan 2008

| Kabupaten/Kota | Angka keluhan kesehatan (%) | | Angka Kesakitan / Morbiditas (%) | |
|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Kab. Fakfak | 6,13 | 14,91 | 4,81 | 12,27 |
| Kab. Kaimana | 21,67 | 16,26 | 18,95 | 10,82 |
| Kab. Teluk Wondama | 35,03 | 31,85 | 23,80 | 26,73 |
| Kab. Teluk Bintuni | 27,34 | 58,14 | 11,68 | 31,46 |
| Kab. Manokwari | 23,95 | 28,15 | 17,89 | 19,44 |
| Kab. Sorong Selatan | 51,85 | 42,95 | 23,70 | 21,49 |
| Kab. Sorong | 21,88 | 30,63 | 14,67 | 25,82 |
| Kab. Raja Ampat | 25,24 | 11,88 | 15,55 | 8,25 |
| Kota Sorong | 48,17 | 40,97 | 35,22 | 27,30 |
| PROV. PAPUA BARAT | 30,53 | 31,00 | 20,41 | 21,96 |

[Sumber: Susenas, 2007 dan 2008]



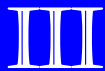
(3) Indikator Kesehatan

Health Indicators

Tabel B.3 Persentase Penduduk Papua Barat yang Berobat Sendiri
Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat/Cara Berobat Jalan

| Kabupaten/Kota | Persentase Pengobatan Sendiri | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| | 2007 | 2008 |
| (1) | (2) | (3) |
| Kab. Fakfak | 52,18 | 64,34 |
| Kab. Kaimana | 26,76 | 60,45 |
| Kab. Teluk Wondama | 69,21 | 61,91 |
| Kab. Teluk Bintuni | 40,42 | 43,07 |
| Kab. Manokwari | 54,77 | 66,60 |
| Kab. Sorong Selatan | 44,44 | 57,02 |
| Kab. Sorong | 45,34 | 70,58 |
| Kab. Raja Ampat | 42,18 | 41,97 |
| Kota Sorong | 67,37 | 67,24 |
| PROV. PAPUA BARAT | 54,75 | 61,25 |

[Sumber: Susenas, 2007 dan 2008]



(1) Indikator Ketenagakerjaan

Labour Indicators

Tabel C.1 TPAK dan TPT Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/
Kota Tahun 2007 dan 2008

| Kabupaten/Kota | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / | | Tingkat Pengangguran Terbuka / | |
|--------------------------|---|--------------|-----------------------------------|-------------|
| | <i>Labour Force Participation Ratio</i> | | <i>Open Unemployment Rate</i> | |
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Kab. Fakfak | 60.33 | 55.36 | 14.56 | 13.66 |
| Kab. Kaimana | 60.45 | 61.23 | 8.35 | 7.66 |
| Kab. Teluk Wondama | 71.49 | 71.68 | 6.8 | 7.72 |
| Kab. Teluk Bintuni | 73.8 | 75.69 | 11.64 | 7.82 |
| Kab. Manokwari | 78.06 | 80.82 | 5.55 | 3.72 |
| Kab. Sorong Selatan | 66.47 | 68.53 | 4.49 | 3.17 |
| Kab. Sorong | 68.94 | 68.59 | 4.66 | 4.99 |
| Kab. Raja Ampat | 65.21 | 57.37 | 4.03 | 2.97 |
| Kota Sorong | 55.18 | 60.77 | 18.83 | 15.87 |
| PROV. PAPUA BARAT | 66.52 | 68.15 | 9.46 | 7.65 |

[Sumber: Sakernas Agustus, 2007 dan 2008]



(2) Indikator Ketenagakerjaan

Labour Indicators

Tabel C.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2007 dan 2008

| Kabupaten/Kota | Angkatan Kerja | | | | Penduduk Usia Kerja | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | Bekerja/ <i>Employment</i> | | Pengangguran/ <i>Unemployment</i> | | 2007 | 2008 |
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Kab. Fakfak | 20.437 | 19.468 | 3.483 | 3.081 | 39.647 | 40.728 |
| Kab. Kaimana | 12.607 | 16.025 | 1.148 | 1.330 | 22.756 | 28.342 |
| Kab. Teluk Wondama | 12.617 | 11.344 | 921 | 949 | 18.937 | 17.149 |
| Kab. Teluk Birtuni | 18.082 | 24.971 | 2.382 | 2.118 | 27.730 | 35.791 |
| Kab. Manokwari | 81.360 | 93.999 | 4.780 | 3.627 | 110.354 | 120.790 |
| Kab. Sorong Selatan | 19.474 | 27.744 | 915 | 908 | 30.676 | 41.812 |
| Kab. Sorong | 39.421 | 45.897 | 1.926 | 2.413 | 59.974 | 70.428 |
| Kab. Raja Ampat | 12.612 | 17.171 | 529 | 525 | 20.153 | 30.844 |
| Kota Sorong | 51.507 | 59.574 | 11.945 | 11.238 | 114.999 | 116.516 |
| PROV. PAPUA BARAT | 268.117 | 316.193 | 28.029 | 26.189 | 445.226 | 502.400 |

[Sumber: Sakernas Agustus, 2007 dan 2008]